

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jangka panjang dalam produktivitas suatu negara menyediakan berbagai jenis barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan perkembangan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa besar kegiatan ekonomi akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam jangka waktu tertentu melalui Indikator tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan nilai total nilai tambah dari semua kegiatan produktif dalam perekonomian (Syahputra, 2022).

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator yang sangat penting untuk mengevaluasi kinerja perekonomian, khususnya untuk menganalisis hasil pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di suatu negara atau daerah. Perekonomian harus tumbuh ketika produksi barang dan jasa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian mendapatkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Menurut (Manduapessy, 2020), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Ukuran yang sering digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan presentase dari produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB mengukur pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai barang dan jasa yang baru diproduksi pada suatu saat atau tahun serta pendapatan total yang diterima dari adanya seluruh produksi barang dan jasa tersebut atau secara lebih rinci. PDRB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi disuatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan biasanya dihitung dalam nilai rill dan tujuan untuk menghilangkan adanya inflasi dalam harga dan jasa yang diproduksi sehingga PDRB rill mencerminkan perubahan

kuantitas produksi. PDRB secara nyata dapat memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit – unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Tabel 1.1

Pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota se-provinsi Lampung tahun 2019 – 2021 (Persen)

Kabupaten/kota	2019	2020	2021
Lampung Barat	5.18	-1.16	2.58
Tanggamus	5.02	-1.77	2.30
Lampung Selatan	5.13	-1.73	2.68
Lampung Timur	3.79	-2.26	0.24
Lampung Tengah	5.35	-1.02	2.88
Lampung Utara	5.33	-1.45	2.82
Way Kanan	5.17	-1.16	2.90
Tulang Bawang	5.41	-1.34	2.88
Pesawaran	5.00	-1.26	2.08
Pringsewu	5.03	-1.21	2.91
Mesuji	5.26	-1.35	2.84
Tulang Bawang Barat	5.36	-1.32	2.89
Pesisir Barat	5.47	-1.18	2.07
Bandar Lampung	6.17	-1.88	3.07
Metro	5.57	-1.79	2.91

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang tingkat pertumbuhannya masih mengalami fluktuatif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik provinsi Lampung Tahun 2019 -2021. pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota provinsi Lampung pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 7 kabupaten/kota yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi di atas angka pertumbuhan ekonomi provinsi, sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi provinsi lampung mengalami kontraksi penurunan sebesar -1,67 persen hal ini di karenakan dampak covid-19 yang menyebabkan pembatasan mobilisasi juga pergerakan masyarakat diseluruh negara. Dan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tumbuh sebesar 2.79 persen, menguat dibandingkan tahun 2020 yang mengalami penurunan. Perumbuhan

ekonomi provinsi Lampung pada tahun 2021 sebanyak 10 kabupaten/kota yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi di atas angka pertumbuhan ekonomi provinsi, yaitu kota Bandar Lampung memiliki angka pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 3,07 Persen di ikuti kota Metro dan kabupaten Pringsewu sebesar 2.19 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi mobil-sepeda motor sebesar 8.26 persen. dan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,78 persen.

Sedangkan untuk masing – masing kabupaten/kota dalam 3 tahun mengalami kondisi fluktuatif. Kondisi tersebut dapat dicermati bahwa antara kabupaten/kota dilihat dari pertumbuhan ekonominya mengindikasikan adanya ketimpangan antara kabupaten/kota. Faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan laju pertumbuhan antar kabupaten/kota yaitu karena secara individu setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda- beda. Artinya kabupaten/kota yang memiliki sumber daya yang melimpah tentu akan mampu memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sementara kabupaten/kota yang memiliki sumber daya yang terbatas atau sedikit akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi.

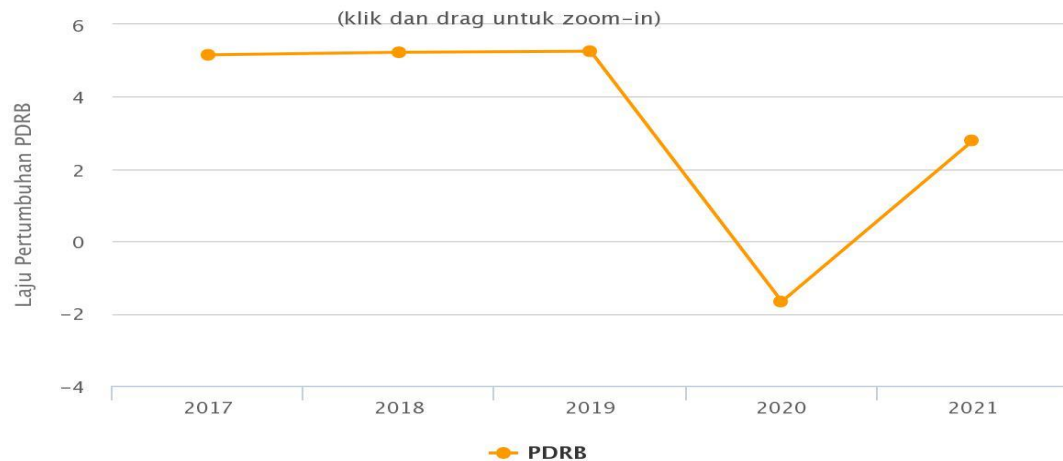
Menurut (Pratama, 2021), Pertumbuhan ekonomi merupakan komponen penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan menggali dan mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, yang mana keduanya memiliki hubungan erat sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat meningkat. Laju pertumbuhan beberapa sektor di setiap kabupaten/kota sangat beragam tergantung dari karakteristik sektor yang ada di kabupaten atau kota tersebut.

Gambar grafik 1.1

Pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung

**Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung ADHK (2010=100)
(Juta Rupiah)**



Sumber: BPS provinsi Lampung

Selama 3 tahun berjalan perekonomian provinsi Lampung masih mengalami gejala fluktuatif juga dimana pada tahun 2019 – 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 di angka 5.27 persen menurun pada tahun 2020 di angka -1.67 persen dan pada tahun 2021 perekonomian provinsi Lampung meningkat menjadi tumbuh lagi sebesar 2.79 persen. Di tengah lesunya perekonomian dunia saat itu dikarenakan wabah covid-19 yang sangat berdampak besar terutama pada pertumbuhan ekonomi.

Dengan begitu, untuk membangun perekonomian yang diharapkan meningkat, maka adanya Undang – Undang nomer 32 tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi Undang – Undang nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang – Undang nomer 33 tahun 2004 perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah menurut pemerintahan daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Era otonomi daerah tidak hanya sekedar menjalankan intruksi dari pusat tetapi benar – benar mempunyai kekuasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam menggambarkan potensi yang selama otonomi bisa dikatakan terpasung. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi

ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan tetapi terkait dengan kemampuan daerah. (Syahputra,2022)

Menurut (Ainingrum,2017), tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah diuntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak – pihak yang menjadi *stakeholder* pemerintah daerah.

Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang di berikan kewenangan dalam otonomi daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah itu provinsi Lampung memanfaatkan sumber daya yang berbeda pada setiap kabupaten/kota. Dengan adanya otonomi daerah provinsi Lampung dapat memiliki peluang untuk meningkatkan daerahnya sendiri yang bersumber dari 15 kabupaten/kota tersebut sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah memunculkan dimensi baru berupa desentralisasi dan dekonsentralisasi. Menurut Undang – Undang nomer 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah dalam mengelola sumber – sumber keuangan sendiri, sehingga daerah mempunyai kesempatan yang lebih dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

Namun setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal tersebut pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk mendanai kebutuhan daerah. UU No 33 tahun 2004 pasal 10 menyatakan bahwa sumber – sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan yang diterima oleh daerah – daerah dari pemerintah pusat.

Salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tersedianya sumber – sumber penerimaan keuangan daerah untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal. Adanya kebutuha pendanaan daerah yang cukup besar pemerintah

memberikan dana perimbangan sebagai sumber penerimaan daerah. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah daerah.

Oleh karena itu pemerintah memberikan beberapa sumber dana untuk demi tercapainya tujuan yang ingin di capai oleh masing – masing daerah dan supaya berhasil, adapun realisasi dana perimbangan pada tahun 2019 – 2021 pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2

Data Realisasi DBH Provinsi Lampung Dalam Ribuan Rupiah Tahun 2019 - 2021

Tahun	Realisasi DBH
2019	138.544.336
2020	157.793.963
2021	230.542.358

Sumber: BPS provinsi Lampung

Ada dua jenis dana bagi hasil yaitu bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Bagi hasil pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan cukai hasil tembakau, sedangkan bagi hasil bukan pajak meliputi kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas dan perikanan. Dapat dilihat pada data diatas dana bagi hasil (DBH) provinsi Lampung mengalami fluktuatif, pada pertumbuhan dana bagi hasil tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu dengan total Rp: 230.542.358. selama tiga tahun terakhir dana bagi hasil selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.3**Data Realisasi (DAU) Provinsi Lampung Dalam Ribuan Rupiah Tahun 2019 – 2021**

Tahun	Realisasi DAU
2019	1.906.780.297
2020	1.732.551.921
2021	1.726.296.248

Sumber: BPS provinsi Lampung

Dapat di lihat pada data di atas penerimaan dana alokasi umum provinsi Lampung mengalami fluktuasi, unruk penerimaan dana alokasi umum tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengana kenaikan sebesar RP: 1.732.551.921. pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan total Rp: 1.726.296.248. selain dari dana alokasi umum pemerintah pusat juga memberikan dana alokasi khusus untuk mendanai kegiatan – kegiatan yang dilakukan daerah secara khusus. Berikut data dana alokasi khusus provinsi Lampung.

Tabel 1.4**Data realisasi DAK provinsi Lampung dalam ribuan rupiah tahun 2019 - 2021**

Tahun	Realisasi DAK
2019	581.870.717
2020	571.540.326
2021	2.232.553.877

Sumber: BPS provinsi Lampung

Dapat dilihat pada data diatas penerimaan dana alokasi khusus provinsi Lampung mengalami fluktuasi, kenaikan dana alokasi khusus tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp: 2.232.553.877. Dan penurunan terjadi pada tahun 2020 dengan penurunan sebesar Rp: 571.540.326.

Dengan peningkatan dana perimbangan, pemerintah daerah provinsi Lampung di tuntut untuk mampu mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin efisien dan efektif, sehingga diharapkan akan benar – benar bermanfaat dan menjadi

stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten/kota yang terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kota. Semakin banyak daerah yang dipimpin oleh pemerintah daerah maka akan semakin tinggi tanggung jawab yang di tanggung oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Provinsi Lampung ditetapkan sebagai objek dalam penelitian ini di karena banyak terjadi fenomena kurangnya insfrastruktur yang memadai. Salah satu contohnya yaitu kabupaten Pesisir Barat. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan presiden (perpres) No 63 tahun 2021 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020 – 2024. Dalam perpres No 63 tahun 2020 itu ada 62 daerah yang juga ditetapkan sebagai daerah tertinggal di Indonesia dan salah satu nya dari provinsi Lampung yaitu kabupaten Pesisir Barat. Padahal jika dana tranfer belanja modal direalisasikan dengan tepat insfrastruktur tersebut dapat dibangun dengan baik (Asmarmani,2020).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah (2019) dengan judul pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi 3 kota di provinsi Sulawesi Selatan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu jika penelitian sebelumnya dilakukan hanya di 3 kota di Sulawesi Selatan maka penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota se-provinsi Lampung serta *time series* (runtutan waktu) pada periode 2019 – 2021.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai **“Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah dana bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional kabupaten/kota di provinsi Lampung priode tahun 2019 – 2021?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional kabupaten/kota di provinsi Lampung priode tahun 2019 – 2021?

3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional kabupaten/kota di provinsi Lampung periode tahun 2019 – 2021?

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan dalam skripsi dibatasi pada dimensi DBH, DAU, dan DAK, dimensi atas nilai pertumbuhan ekonomi daerah, serta deret waktu penelitian. Deret waktu yang dipilih adalah mulai tahun 2019 hingga tahun 2021 untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi regional kabupaten/kota di provinsi Lampung sebagai daerah otonom khusus selama periode tahun 2019 hingga tahun 2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta wawasan pembaca mengenai APBD dan PDRB serta dapat juga digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah pemerintah dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pemerintah dalam meningkatkan belanja modal.

1.6 Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika pembambahasan yang merupakan kerangka dari keseluruhan tulisan.

2. BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi teori – teori yang mendasari pembahasan, yang diambil dari literatur buku – buku, tulisan – tulisan ilmiah, maupun bahan lain yang berkaitan dengan topik penulisan skripsi. Teori tersebut akan menguraikan mengenai sumber – sumber dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta teori pertumbuhan ekonomi dan penelitian – penelitian sebelumnya. Uraian pada bab ini akan ditutup dengan perumusan hipotesis penelitian.

3. BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan hal – hal yang dicakup dalam metodologi penelitian yang digunakan, yaitu desain penelitian, oprasionalisasi variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan pengujian model analisis penelitian.

4. BAB IV Hasil Dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang hasil analisis menyeluruh atas penelitian yang diteliti dan pembahasan penelitian hingga mencapai tujuan.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil yang telah diperoleh dalam penelitian dan juga saran – saran yang bermanfaat yang dapat digunakan untuk pembaca dan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang referensi yang diambil dalam penelitian ini dapat berisi jurnal ilmiah, buku – buku, ataupun hasil penelitian dari orang lain yang dapat digunakan sebagai referensi.

LAMPIRAN

